

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengatur semua bentuk aktivitas pendidikan nasional melalui peraturan perundang-undangan. UUD 1945 dalam alinea ke 4 mengamanahkan agar pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara terperinci UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem pendidikan Indonesia penjabaran mengenai prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia tertuang dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6 (“UU No. 20 Tahun 2003,” 2003).

Pendidikan di Indonesia sedang berkembang dari era revolusi industri 4.0 menjadi *social education* 5.0 didalamnya mengisyaratkan agar penerapan pendidikan harus dilakukan dengan demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa (Parker & Raihani, 2011). Selanjutnya UU SISDIKNAS pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas baik.

Amanah tersebut seperti halnya sangat bertentangan dengan amanah undang-undang SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 hingga 4, yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau tertinggal, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan saat ini seolah-olah merupakan salah satu bentuk dari amanah pasal tersebut, dimana lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi. Pemilahan siswa yang memiliki potensi dan kecerdasan diatas rata-rata dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dibawah rata-rata menjadi salah satu bukti yang tersirat.

Sistem pendidikan kejuruan di Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian sumber daya manusia, perlu perubahan kebijaksanaan berkenaan dengan pendidikan kejuruan. Upaya-upaya itu antara lain perubahan dari sistem pendidikan *supply-driven* atas kebutuhan masyarakat luas ke sistem

pendidikan *demand-driven* yang dipandu oleh kebutuhan pasar kerja, perubahan dari sistem pendidikan yang berbasis sekolah dengan pemberian ijazah ke sistem pendidikan yang memberikan kompetensi sesuai dengan standar nasional yang baku.

Salah satu upaya meningkatkan ketrampilan dan keahlian sumber daya manusia yang dikembangkan adalah sistem pendidikan kejuruan berdasarkan kompetensi yang dipacu oleh kebutuhan pasar. Pengembangan sistem ini didasarkan kepada asumsi bahwa sistem pendidikan kejuruan *supply-driven* yang diterapkan selama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, baik pelanggan masa kini maupun pelanggan masa depan.

Sistem pendidikan berdasarkan kompetensi mengupayakan agar keluaran dari suatu lembaga pendidikan kejuruan memiliki ketrampilan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan suatu standar kompetensi dengan masukan dari industri dan badan usaha lain. Standar kompetensi yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai pemberian sertifikat kompetensi. Dengan demikian maka sistem pendidikan kejuruan yang dikembangkan mempunyai ciri, di samping mengacu pada profesi dan ketrampilan yang baku juga di pandu oleh kebutuhan pasar kerja yang nyata.

Sistem pendidikan yang dikembangkan berfokus tidak hanya pada pendidikan formal. Tetapi juga meliputi non-formal. Ada tiga jenis siswa yang merupakan sasaran sistem pendidikan kejuruan yang harus dikembangkan yaitu : siswa sekolah kejuruan formal, para karyawan yang sudah bekerja, dan para generasi muda calon pekerja. Standar kompetensi digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat ketrampilan dan profesionalisme ketiga jenis siswa tanpa memandang darimana dan bagaimana diperoleh, baik melalui lembaga pendidikan formal, pendidikan luar sekolah (*off job training*) atau pelatihan sambil bekerja (*on the job training*). Setiap individu dapat menempuh ujian lembaga yang telah ditentukan dan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki untuk lembaga pendidikan kejuruan formal kepada para lulusan akan diberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat ketrampilan dan keahlian yang dimiliki, disamping Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selama ini diberikan. Sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh seseorang akan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kompetensi ke tingkat selanjutnya.

Untuk menjadi tenaga kerja yang professional, siswa tidak hanya perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan, tetapi perlu memiliki kiat (*arts*). Pengetahuan dan ketrampilan dapat dipelajari dan dilatih di sekolah akan tetapi unsur kiat hanya dapat dikuasai melalui proses pembiasaan dan internalisasi. Sekolah pada umumnya hanya dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam bentuk simulasi sehingga tidak mungkin diharapkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang professional. Oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama yang era tantara sekolah dan industri, baik dalam perencanaan dan penyelenggaraan maupun dalam pengelolaan pendidikan. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan suatu sistem pendidikan kejuruan yang disebut sistem ganda.

Pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program-program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, dan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu. Dalam PSG lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan lainnya dan industri secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan atau program pelatihan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, dan penilaian sampai dengan upaya penempatan lulusan. Pengaturan penyelenggaraan program kapan diselenggarakan di sekolah dan kapan diselenggarakan di industri dapat mempergunakan *hour release*, *day release*, atau *block release*. Komponen pendidikan normative, adatif, dan sub komponen teori kejuruan diselenggarakan di sekolah sedangkan sub komponen praktek keahlian produktif diselenggarakan di industri, sub komponen praktek dasar kejuruan dapat dilaksanakan di sekolah atau industri.

Sesungguhnya penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK telah berjalan sejak tahun 1993/1994 hingga sekarang. Sistem ini merupakan implementasi dari konsep *match and mitch* dengan PSG perancangan kurikulum, proses pembelajaran dan penyelenggaraan evaluasinya di desain dan dilaksanakan bersama-sama antara pihak sekolah dan industri. Diharapkan nantinya para lulusan SMK akan menjadi para lulusan yang siap kerja melalui PSG siswa belajar di dua tempat yaitu sekolah dan industri. Di sekolah para siswa belajar teori dari para guru atau instruktur yang kegiatannya pada

umumnya dibiayai pemerintah. Sedangkan kegiatan belajar yang diselenggarakan di perusahaan/industri artinya para siswa ini belajar dan mendapatkan pelatihan praktik dari para instruktur dari pihak sekolah yang bersangkutan pembiayaan dilakukan oleh perusahaan terkait.

Salah satu pendidikan formal yang dapat mencetak sumber daya siap pakai, produktif, dan berkualitas adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003). Namun pada kenyataannya, sampai saat ini masih ada permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya adalah pendidikan kejuruan. Permasalahan ini berupa adanya kesenjangan antara kualitas lulusan dari pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).

Masalah kesenjangan merupakan masalah lama yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Kesengajaan atau sering dikenal dengan istilah *mismatch* adalah ketidak sesuaian/ketidakcocokan antara kualifikasi pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari (Hanafi, 2013) dan (Muhson et al., 2012) bahwa hal yang menimbulkan mismatch adalah pendidikan kejuruan tidak cukup fleksibel dalam merespon permintaan dunia kerja dan industri, sehingga timbul ketidakmampuan lembaga pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan realitas tuntutan dunia industri yang sangat maju dengan pesatnya.

Ketiga pernyataan tersebut dikuatkan oleh Saunders, Skinner, dan Beresford yang menjelaskan bahwa adanya kesenjangan ketrampilan baik keterampilan kunci dan teknis berasal dari semua pemangku kepentingan, akibatnya tampak ada ketidakcocokan antara pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang dianggap penting bagi organisasi, dosen, pekerja dan siswa yang memiliki bobot sama pentingnya di tempat kerja yang berimplikasi pada masa depan sektor yang akan datang.

Kecenderungan pendidikan Indonesia yang sekedar menghasilkan lulusan tanpa memperhatikan secara detail kemampuan lulusan ini mengakibatkan lulusan SMK semakin meningkat. Selain lulusan tersebut tidak bekerja sesuai dengan bidang yang diambil sewaktu sekolah, lulusan harus menunggu dalam waktu lama untuk memperoleh pekerjaan tersebut.

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2021), jumlah pengangguran mencapai 9,1 juta jiwa. Dari angka tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan pendidikan pada tingkat SMK memiliki angka pengangguran yang paling tinggi. Hal tersebut ditunjukkan seperti pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. 1 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan bulan Agustus 2021

Dari gambar tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan mayoritas pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penduduk dengan jenjang Pendidikan akhir SMK yang menganggur mencapai 11,13% pada Agustus 2021. Sebagian besar dari lulusan SMK ingin langsung bekerja, tetapi tidak terserap di dunia usaha. Itu disebabkan oleh meningkatnya lulusan SMK yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja. Untuk itu, para pelajar SMK perlu mendapatkan tambahan pelatihan kecakapan, *softskill* seperti *leadership*, komunikasi, dan kreativitas. Selain itu, lulusan SMK didorong agar memiliki jiwa wirausaha sehingga tidak hanya mencari pekerjaan tetapi justru dapat menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya. Selain lulusan SMK, jenjang pendidikan dengan TPT tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,09%. Diikuti jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 6,45%, Universitas 5,98%, Diploma 5,87%, serta jenjang Pendidikan Sekolah Dasar ke bawah sebesar 3,61%.

Jumlah pengangguran secara nasional sebanyak 9,1 juta jiwa pada Agustus 2021. Angka tersebut mencapai 6,49% dari total Angkatan kerja nasional yang mencapai 140,15 juta jiwa.

Menurut M. Sairi Hasbullah, Deputy Bidang Statistik dan Sosial BPS bahwa alasan terkait pengangguran terbanyak didominasi oleh lulusan SMK karena keahlian lulusan SMK belum tentu match dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan terpaksa menunggu lama, akibatnya semakin banyak pengangguran (Ariyanti, 2017). Hal ini sejalan dengan pemaparan dari (Deny, 2018) bahwa menurut kepala Dirjen Binalattas Kemenaker, Bambang Satrio Lelono, kondisi Pendidikan di Indonesia masih belum siap pakai. Kemudian kondisi lulusan SMK dipaparkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa sebanyak 82% tenaga kerja di Indonesia di luar negeri ternyata berstatus lulusan SMK. Joko Widodo menyebut kondisi ini tidak dapat diteruskan. Sehingga harus ada perbaikan di dunia pendidikan kejuruan dalam hal skill agar lulusannya masuk ke dunia kerja secara tepat sasaran.

Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dengan harapan melalui Inpres tersebut dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMK saat ini, baik dari segi kualitas pendidikan dan kualitas lulusan SMK yang belum memiliki daya saing tinggi. Sejalan dengan Inpres tersebut, dalam rangka untuk menyukseskan program revitalisasi SMK itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri.

Secara filosofis *link and match* mengandung makna wawasan pengembangan SDM, wawasan masa depan, wawasan mutu dan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah dan wawasan efisiensi. *Link and match* menyangkut proses interaktif dengan hasil yang sesuai. Secara teoritis, konsep *link and match* mengacu pada keterkaitan (*link*) dan kesesuaian (*match*) kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya dunia pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan dunia kerja, seperti kalangan industri.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai *implementasi link and match* diketahui bahwa lingkup kegiatan dilakukan dalam perusahaan (*industry*), melalui kebijakan penempatan pekerjaan dalam jenis pekerjaan serta jabatan yang tepat (*the right man in the right place*), sedangkan lingkup penelitian ini dilakukan di dalam Pendidikan kejuruan (SMK) terhadap lulusan di SMK Negeri 1 Pedan tahun lulus 2021/2022. Selain itu pada penelitian sebelumnya data diperoleh menggunakan metode survey dan *in-depth interview*, sedangkan dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui *implementasi program link and match* di SMK Negeri 1 Pedan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti telah menyusun beberapa rumusan masalah penelitian, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan program *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri pada lulusan Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat terjadinya *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri pada lulusan Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri pada lulusan Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat terjadinya *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri pada lulusan Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan.
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai program *link and match* antara pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki pelaksanaan program *link and match* antara lembaga pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- c. Dapat menambah pengetahuan tentang ketercapaian pendidikan kejuruan.

2. Manfaat praktis

- a. Pihak SMK Negeri 1 Pedan
 - 1) Dapat memahami tentang seberapa besar keberhasilan program *link and match* di SMK Negeri 1 Pedan.
 - 2) Dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.
 - 3) Dapat dijadikan bahan masukan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- b. Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)
 - 1) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kerjasama dengan sekolah.
 - 2) Dapat dijadikan bahan masukan untuk menyesuaikan kompetensi dunia usaha dan dunia industri dengan kompetensi yang dibelajarkan di sekolah.